

MENCARI PENGERTIAN Tentang PEMBANGUNAN

Oleh: W. Poespoprodjo

Dalam konteks eksistensi kita sebagai bangsa, istilah pembangunan merupakan istilah kunci. Tetapi sebagai istilah, pengertian pembangunan seringkali memang masih belum jelas dalam banyak hal. Manakala didalam dan diperhatikan berbagai teori pembangunan yang ada, pembangunan merupakan istilah ekuivokal, bukan istilah yang mempunyai satu arti.

Munculnya LSM-LSM, Forum Demokrasi, Liga Pemulihan Demokrasi (H.J. Princen), Isyu Golput, Panitia Persiapan Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (H. Ali Sadikin), dan lain sebagainya, de facto bertanya tentang dan kritik terhadap pengertian tentang pembangunan, tentang realisasi pembangunan. Dapat dibenarkan realisasi pembangunan yang ada dan yang sedang berjalan? Pembangunan itu apa sebenarnya?

Oleh karena itu masalah mencari pengertian tentang pembangunan, paling sedikit reorientasi, perenungan kembali pengertian tentang pembangunan yang sebenarnya selalu akan aktual, relevan dan bahkan selalu mendesak. Kekacauan pengertian tentang pembangunan akan berakibat pada kekacauan dalam melihat pembangunan, dalam mengambil keputusan-keputusan tentang dan dalam pembangunan, dalam merancang, dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan-kegiatannya. Realisasi pembangunan yang tidak sebagaimana seharusnya akarnya terletak dalam konsepsi yang tidak sebagaimana seharusnya, dan eksplisitasi serta penerjemahan konsepsi yang tidak sebagaimana seharusnya.

Bahkan bukan tidak mungkin karena kekacauan pengertiannya, pembangunan kita de facto akan dan telah dijadikan medan pergulatan dan persaingan arahan norma-norma dan model pembangunan pemberi bantuan dan atau tangan-tangan kapitalisme strukturalistik internasional sehingga pembangunan sesungguhnya merupakan usaha dan proses pelestarian berbagai bentuk kolonialisme baru demi pengabdian kepentingan-kepentingan imperialistik mereka di Indonesia.

Memang tidak ipso facto bahwa kejernihan dan kejelasan pengertian tentang pembangunan akan menjamin realisasi pembangunan dengan baik dan benar. Namun sulit untuk diingkari bahwa kejernihan dan kejelasan pengertian tentang pembangunan dapat menjadi orientasi, pedoman yang jelas bagaimana seharusnya strategi pembangunan disusun, bagaimana pembangunan seharusnya dilaksanakan, apa yang dengan kejelian harus diwaspadai, apa yang harus dihindari, apa yang harus dikerjakan, kesalahan apa yang harus diperbaiki, kesalahan, eksplisitasi dan penerjemahan apa yang harus dikoreksi. Dan dalam konteks demikian, preambule UUD 1945 khususnya sila kedua Pancasila dapat bahkan seharusnya berfungsi dalam mengidentifikasi terjadinya deviasi, alienasi dan dalam menentukan pembebasannya.

Berhubung dalam mencari pengertian tentang pembangunan tidak ada ilmu yang memadai untuk menggarapnya selain filsafat, maka refleksi filsafati tidak dapat dihindari. Namun dalam berbicara tentang masalah-

masalah yang berkaitan dengan manusia seperti pembangunan, ilmu-ilmu seperti misalnya ekonomi, hukum, sosiologi, politikologi, anthropologi budaya, psikiatri dan cabang-cabang ilmu kedokteran lainnya, psikologi, komunikasi, psikopatologi selalu dapat diharapkan memberikan masukan-masukan yang berguna, sesudahnya dengan cermat diidentifikasi implikasi metafisiknya, implikasi epistemologisnya, implikasi moralnya. Karena tidak jarang paham behaviourisme yang materialistik itu misalnya menyelinap di balik pemikiran ekonomi, politik, sosiologi, psikologi dan seterusnya. Banyak pula studi psikologi sosial yang Hobbesian yang bersemangat *homo homini lupus*.

Pembangunan: Tuntutan Intrinsik Eksistensi Manusia

Apabila pembangunan tergantung pada dan terserah saja pada semau-mau orang atau pihak yang kuat dan berkuasa, maka tidak akan ada pembangunan yang baik atau buruk, tidak ada pembangunan yang untuk menopang ketidakadilan, tidak ada pembangunan yang dirancang untuk melestarikan tirani, untuk mengabadikan penjajahan oleh pihak yang kuat atas pihak yang kecil-lemah-miskin. Tidak ada perbedaan antara pembangunan yang manusiawi dan pembangunan yang tidak manusiawi. Menurut jalan pikiran ini, pembangunan adalah baik manakala menunjang kemauan dan kepentingan pihak yang kuat dan berkuasa, tidak peduli hal itu menindas atau semakin menindas si kecil-lemah-dan miskin. Pembangunan tidak baik alias buruk manakala pembangunan tersebut tidak menunjang kemauan dan kepentingan pihak yang kuat dan berkuasa.

Dalam konsepsi yang positivistik tentang pembangunan seperti di atas, pengertian tentang pembangunan terserah pada kesewenang-wenangan seseorang atau kelompok biasanya pihak yang kuat. Tetapi pandangan tersebut berlawanan asas dengan kenyataan pengalaman manusia yang *de facto* membedakan antara hal-hal yang intrinsik baik, intrinsik buruk, dan yang intrinsik *indifferent* yang dapat menjadi ekstrinsik baik atau ekstrinsik buruk. Tetapi sesuatu yang

intrinsik baik tidak dapat dibuat ekstrinsik buruk, dan yang intrinsik buruk tidak dapat dibuat ekstrinsik baik. Maka perbedaan antara pembangunan yang baik dan pembangunan yang buruk sesungguhnya-sungguhnya juga tidak masalah sewenang-wenang.

Dari refleksi filsafati tentang moralitas dapat diperoleh informasi bahwa dasar atau norma perbedaan antara baik dan buruk adalah sesuai atau tidaknya dengan hakikat manusia. Oleh karena itu pengertian dan moralitas tentang pembangunan juga seyogyanya, seharusnya, diangkat dari dan dicari akarnya pada apa sesungguhnya manusia itu, sehingga dapat diketahui, apa sesungguhnya pembangunan itu, mana pembangunan yang baik dan mana yang buruk. Manusialah arah ke mana pengertian dan moralitas tentang pembangunan niscaya dicari.

Pada saat seorang bayi manusia lahir, ia adalah seorang manusia. Ia adalah eksistensi rohani-jasmani, jasmani-rohani. Suatu kenyataan yang dialektis antara yang kodrati dan yang adikodrati. Eksistensinya belum selesai. Ia masih harus menyelesaikan dirinya baik dengan pertolongan orang lain maupun kelak dengan usaha sendiri. Ia masih harus memanusia, memanusiaikan dirinya, memanusiaikan seluruh aspek-aspeknya dalam perspektif yang utuh dari tujuan eksistensinya: rohani dan jasmaninya, akal-budi dan kehendaknya, panggilan dunianya dan panggilan akhiratnya, singkat kata, memanusiaikan dirinya dalam keseluruhan manusianya dan sebagai manusia yang kongkrit.

Demikian telah ditunjuk letak akar pengertian tentang pembangunan. Nampak pula bahwa pembangunan bukan produk suatu keinginan yang manasuka tetapi adalah tuntutan, kewajiban moral yakni tuntutan, kewajiban manusia sebagai manusia, tuntutan intrinsik eksistensi manusia. Pembangunan adalah suatu keharusan bagi manusia. Manusia tidak boleh tidak harus membangun, masih senantiasa harus membangun kemanusiaannya, agar eksistensinya tidak berupa puing-puing atau keping-keping yang tidak terintegrasikan.

Masalah Cara Berpikir

Tetapi manusia dan masalah yang berkaitan dengan manusia tidak dapat dan tidak

mungkin diangkat sebagaimana mestinya apabila cara berpikir yang dipakai tidak tulus terhadap segalanya yang insani. Demikian sebabnya mengapa ilmu-ilmu sosial tidak mencukupi bahkan dapat dikatakan steril, tidak mampu untuk berbicara tentang manusia secara memadai dan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya pula jika ilmu-ilmu sosial sebenarnya juga tidak dapat berbicara tentang pembangunan secara memadai dan sebagaimana mestinya.

Ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu yang *de facto* mengacu pada pola ilmiah ilmu alam senantiasa memandang manusia dengan kategori-kategori substansi, dengan kategori-kategori benda. Secara prinsipil ilmu bahkan tidak membedakan manusia dari benda, rohani dari jasmani. Verifikasi ilmiah adalah verifikasi empiris. Jika cara berpikir ilmu saja yang diandalkan, maka hanya aspek-aspek kejasmanian manusia yang dapat disentuh.

Logika ilmu yang adalah logika untuk menguasai, tidak memberi peluang bagi kenyataan atau realitas yang selengkapnya untuk berbicara. Kenyataan atau realitas diperintahkan, disuruh tampil seperti kemauan ilmuwan, menurut kategori-kategori ilmuwan. Dengan cara berpikir *homo-mensura* (manusia ilmuwan sebagai ukuran) seperti ini, kekayaan kenyataan atau realitas juga tidak pernah akan terungkap.

De facto dalam banyak hal, rasionalitas ilmiah dijadikan standar/pembakuan bermutu tidaknya sesuatu. Segala hal yang tidak terjangkau oleh rasionalitas ilmiah terbilang sebagai irrasional, subyektif(istik), mitos, pra-ilmiah, primitif, tidak bermutu.

Oleh karenanya para filsuf dari Dunia Ketiga melihat rasionalitas ilmiah sebagai jenis rasionalitas yang agaknya memang dirancang untuk meneguhkan superioritas bangsa kulit putih atas bangsa kulit berwarna. Perlu diwaspadai, begitu mereka mengatakan, karena akal-budi, rasio, dalam kenyataan, adalah memihak. Dan tidak salah pula kalau dikatakan bahwa rasionalitas dalam banyak kejadian adalah hasil indoktrinasi. Suatu kesalahan besar dan kesalahan mendasar yang terjadi di Dunia Ketiga dan di negara-negara

bekas penjajahan adalah meneruskan cara berpikir yang ditinggalkan oleh bekas penjajah yang terdapat di dalam sistem pendidikan, di dalam berbagai sistem kemasyarakatan lainnya. Dengan ini penjajahan terlestarikan, terawetkan, dan dengan demikian pula Dunia Ketiga dan bekas negara-negara jajahan tidak pernah menyadari keadaan dirinya yang sesungguhnya antara lain bahwa telah teralienasikan. Manusianya telah menjadi "manusia tanpa alternatif" (Kolakowski) yang hidup dalam masyarakat yang *herrschaftsmässig* dan unidimensional (Herbert Marcuse).

Pemikiran-pemikiran di atas seyogianya menyadarkan kita berapa jauh kita sesungguhnya telah teralienasikan, berapa jauh obyek kita sesungguhnya telah teralienasikan dan berapa jauh metode atau metode-metode yang kita pakai sebenarnya telah teralienasikan. Harus dicari dan digunakan cara berpikir yang memungkinkan manusia secara utuh terpahami. Ini berarti bahwa rasionalitas yang sempit perlu diletakkan kembali ke dalam konteks kenyataan hidup yang sesungguhnya, sehingga disadari peranan yang tidak dapat diabaikan dari rasionalitas yang lebih luas, yang lebih insani. "Lebih insani" karena lebih memungkinkan untuk mengungkapkan kenyataan manusia yang sebenarnya. Hal ini berarti cara berpikir yang bersifat hermeneutikal, mengeluarkan arti (*eksegesis*) sebagai kebalikan dari jenis berpikir yang memasukkan arti (*inexesis*) yang tentu saja dengan segala keterbatasannya.

Berbagai Ideologi yang Tidak Benar

Sebelum melangkah lebih lanjut sebagai peningkatan kehati-hatian yang lebih besar akan dibicarakan beberapa ideologi pembangunan yang perlu diwaspadai.

Dalam rangka pembangunan masyarakat manusia telah dipikirkan dan diedarkan berbagai rencana. Banyak di antaranya yang menghilang atau sudah hilang, atau banyak berubah, atau dayatariknya untuk sebagian besar telah hilang.

Rencana-rencana tersebut disebut orang ideologi yakni pandangan-pandangan hidup atau pandangan-pandangan dunia yang di-

maksudkan untuk mengatur dan membangun masyarakat. Umumnya ideologi-ideologi tersebut lahir sebagai reaksi terhadap berbagai keadaan buruk yang ada, dipikirkan dan dirumuskan oleh para pemikir serta kemudian disebarluaskan ke dalam masyarakat yang selanjutnya terkuasai oleh ideologi tersebut dan terdorong untuk mewujudkan pikiran-pikiran tersebut menjadi gerak langkah yang nyata.

Tidak jarang ideologi-ideologi tersebut menyodorkan dasar yang pincang untuk menopang pembangunan masyarakat manusia. Ideologi tersebut sepihak dan memberikan gambaran yang cacat tentang manusia.

Liberalisme misalnya menyatakan diri sebagai pembela kemerdekaan manusia, tetapi melupakan keterikatan sosial manusia. Kolektivisme menegaskan manusia sebagai makhluk sosial tetapi tidak menggubris martabat pribadi manusia dan tidak peduli dengan tujuan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Marxisme memandang manusia sebagai faktor produksi tetapi tidak mengakui martabat rohani manusia. Marxisme membuka dan menciptakan mekanisme yang karenanya manusia kehilangan kemanusiaannya dan manusia menjadi barang dagangan. Inti Marxisme adalah bahwa materialismenya adalah kebenaran manusia tanpa kebenaran yakni deskripsi eksak manusia yang teralienasikan, yang telah dibuat untuk tidak mengenali dirinya kembali/lagi. Kapitalisme mengakui fungsi ekonomi kerja, tetapi arti insani yang fundamental dari kerja diabaikan dengan menundukkan kerja pada hukum laba yakni pada hukum benda-benda dan pada kekuasaan uang. Facisme (perlu disadari semangat facistik dari konsepsi negara integralistik) melihat manusia hanya sebagai warganegara yang tercipta untuk mengabdikan demi kebesaran tanah airnya. Teknokrasi modern melihat dalam manusia tidak lebih dari "*homo faber*" yang menemukan dan menjinakkan alam tetapi buta terhadap ukuran-ukuran sosial dan ukuran-ukuran atas-kodrati/adi-krati.

Pandangan-pandangan di atas memberikan gambaran yang cacat tentang manusia. Kendati masing-masing aspek dari hakikat dan hidup manusia itu mempunyai nilai tertentu, tetapi

apabila aspek tadi dilepaskan dari keseluruhan dan dijadikan nilai mutlak maka gambaran manusia yang cacatlah yang diperoleh.

Pandangan-pandangan di atas tidak hanya sepihak tetapi juga bersifat tidak realistis, utopis. Ideologi pembangunan seperti itu hakikatnya menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan atau kebenaran-kebenaran yang tidak dapat disingkirkan oleh kemajuan ekonomi atau kemajuan sosial yang manapun. Penyakit, penderitaan, kematian sebagai akibat kelemahan, keterbatasan manusia, akan selalu ada. Tiada *policy*, juga *policy* yang bijaksana, yang dapat menghapuskannya. Barangsiapa menjanjikan dapat membebaskan manusia dari semuanya itu hanya akan membuat penderitaan semakin tidak tertahankan.

Misteri-misteri yang menyertai kenyataan hidup manusia tidak dapat diabaikan dalam pembangunan. Manakala diabaikan maka manusia bukan lagi manusia yang sesungguhnya. Manusia tidak boleh berambisi menjadi roh murni, tetapi juga merupakan bencana apabila manusia terjerumus ke dalam kejasmaniannya dan hidup layaknya binatang.

Inti Pembangunan Adalah Pembangunan Manusia

Masalahnya karena manusia harus memanusia. Ini adalah tugas hidupnya yang dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa manusia lahir dalam keadaan belum selesai. Ia masih harus mewujudkan sintesis yang tepat dari kenyataan hidupnya yang rohani dan yang jasmani, sintesis yang benar dari yang kodrati (natural) dan yang adikodrati (supernatural), sintesis yang benar dari akal budi dan kehendaknya, sintesis dari panggilan keberadaannya di dunia dan panggilan akhirnya, agar ia menjadi manusia kongkrit yang utuh, singkat kata, manusia yang manusiawi sehingga tidak mengingkari kenyataan tuntutan dignitas dan batas-batas kemanusiawian yang senyatanya sesuai rencana penciptaan Sang Pencipta. Terdapat keharusan yang mesti ditaati jika manusia hendak hidup sebagai layaknya manusia. Inilah sebab mengapa orang tidak boleh membangun asal membangun. Pembangunan di bidang apapun harus direncanakan untuk membangun ma-

nusia, untuk pembangunan manusia agar semakin terwujud martabat kemanusiawian-nya. Pembangunan harus senantiasa ditafsirkan dalam konteks derajat dan martabat kemanusiawian manusia.

Pembangunan dan peningkatan tahap-tahap pembangunan senantiasa harus berarti menunjang (semakin menunjang), menopang (semakin menopang), membantu (semakin membantu), menciptakan kondisi-kondisi (semakin menciptakan kondisi-kondisi) bagi pembangunan dan peningkatan derajat kemanusiawian manusia. Sehingga harus dicatat bahwa manusia adalah sasaran seluruh pembangunan, seluruh strategi pembangunan, seluruh policies pembangunan, seluruh taktik pembangunan.

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang benar dan baik manakala pembangunan ekonomi dapat membuat manusia menjadi manusiawi (sesuai humanitasnya), atau lebih manusiawi sehingga manusia menjadi merdeka, bukan kemerdekaan seekor burung yang lepas dari sangkar yang membuat manusia hanya berada sedikit di atas binatang, tetapi kemerdekaan yang mengkondisikan manusia untuk dapat mencari kebenaran untuk tidak tergantung dari belas kasihan orang dan dapat hidup sebagaimana seharusnya dan layak-nya seorang manusia hidup, untuk dapat mengusahakan perkembangan pribadi dan kesejahteraan bersama. Apabila pembangunan ekonomi dilepaskan dari konteks manusia sebagai manusia yang selalu akan berarti dilepaskan dari konteks moralitas, maka yang pasti akan tampil adalah kenyataan Darwinisme ekonomi, Darwinisme sosial, homo homini lupus, animalia economica (binatang-binatang ekonomi) di bidang kehidupan ekonomi.

Pembangunan sosial adalah pembangunan sosial yang baik dan benar manakala pembangunan tersebut dapat menunjang dan menciptakan kondisi bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan kepekaan sosial dari manusia yang hakikatnya adalah juga makhluk sosial. Dalam pembangunan sosial, setiap penyelesaian, setiap kemajuan menyodorkan masalah-masalah baru dan meminta penyesuaian-penyesuaian baru. Ini

berarti dituntut kepekaan yang lebih tinggi terhadap humanitas manusia, terhadap moralitas. Masalah-masalah sosial, apalagi masalah-masalah sosial yang besar senantiasa harus dilihat dengan perhatian terhadap nilai-nilai moral yang lebih tinggi dari umat manusia. Setiap fakta yang teridentifikasi dipikirkan dan dipertimbangkan dari titik pandang tersebut.

Pembangunan politik adalah pembangunan politik yang baik dan benar manakala pembangunan tersebut menunjang dan menciptakan kondisi (ingat: arti kondisi adalah hal-hal yang harus ada) bagi terwujudnya dan meningkatnya kesadaran manusia warga-negara akan kewajiban, hak-hak dan tanggung jawabnya membangun dan menegara. Oleh karena itu politik tanpa moral bukan hanya melahirkan kebidaban tetapi akan membuat manusia yang satu atau kelompok yang satu mengeksploitir yang lain demi nafsu kuasa.

Pembangunan hukum adalah pembangunan hukum yang baik dan benar manakala pembangunan tersebut menunjang dan menciptakan kondisi bagi kepekaan dan meningkatnya kepekaan manusia/warga-negara terhadap kemerdekaan yang benar. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan memajukan kemerdekaan yang benar. Dan kemerdekaan yang benar bukanlah keliaran, bukan ijin mengerjakan yang jahat melainkan kemampuan untuk menjuruskan dirinya dengan pertolongan hukum ke arah hal yang baik. Bagi manusia yang baik sebagai manusia sebenarnya tidak memerlukan hukum positif. Ia akan selalu lebih dari tuntutan hukum positif. Baginya tuntutan moral telah menjadi pedoman gerak hati, pikiran dan perilakunya. Oleh karena itu pembangunan hukum juga menuntut pembangunan pendidikan di bidang moral sehingga juga dilihat bahwa legalisme moral, positivisme moral, positivisme hukum, Darwinisme sosial adalah tidak dapat dan tidak boleh dipertahankan, apalagi dibina.

Batas-batas Pembangunan

Pembangunan meskipun mencakup pembangunan fisik, hakikatnya bukan realitas fisik. Maka kontur pembangunan juga tidak dapat ditunjuk sejelas menunjuk garis batas realitas fisik.

Batas-batas pembangunan adalah batas-batas "keapaan" humanitas yang otentik. Pembangunan terikat oleh kewajiban hidup manusia sebagai manusia, tugas hidup manusia sebagai manusia, komitmen manusia untuk mem manusia. Tidak ada alternatif.

Apabila pembangunan dikatakan harus memihak mereka yang kecil-lemah-miskin karena adalah tidak manusiawi (tidak sesuai dengan nilai-nilai derajat manusia), merupakan situasi yang tidak manusiawi manakala pembangunan ternyata membuat orang kaya semakin kaya raya, dan mereka yang kecil-lemah-miskin semakin terhimpit, semakin tertindas, terhisap, terkalahkan, terpinggirkan, terjajah, terhapuskan kesempatannya. Kenyataan ini harus cukup membuka mata semua dan setiap warganegara, semua dan setiap pemimpin akan perlunya koreksi, bahkan koreksi total terhadap strategi, taktik atau praktek pembangunan yang disusun dan dilakukan dan ternyata merupakan strategi, taktik dan praktek pembangunan yang tidak manusiawi yang ternyata hanya memihak bahkan sangat memihak golongan masyarakat kecil yang kuat. Adalah merupakan prinsip moral (tuntutan hakikat manusia sebagai manusia) manakala mereka yang kecil-lemah-miskin harus memperoleh prioritas perlindungan. Adalah pandangan serta sikap yang salah dan teralienasikan apabila terdengar dikatakan bahwa "lumrah, biasa orang kecil itu kalah mau apa lagi."

Apabila pembangunan membuat manusia setia dan semakin setia dengan serta semakin merealisasikan nilai-nilai humanitas yang otentik, maka pembangunan semacam itu adalah baik dan diberitakan. Pembangunan yang begini mengangkat, mempertajam, membukakan nuansa-nuansa nilai-nilai dignitas kemanusiaan dan akan mampu mengangkat, merangsang, memotivasi manusia ke puncak-puncak nilai-nilai dignitas manusia.

Tetapi jika sesuatu disebut pembangunan namun ternyata menjauhkan, menyelewengkan, memerosotkan manusia dari nilai-nilai dignitas manusia, dan membuat serta menggiring manusia menjadi makhluk infrahuman, subhuman, maka pembangunan semacam itu tidak sepatutnya disebut pembangunan. Lebih

tepat disebut proses penghancuran, proses pembusukan, subversi (omverwering).

Begitu misalnya apabila sesuatu disebut pembangunan pendidikan tetapi ternyata membuat manusia/anak didik menjadi robot, dan tidak didik mencapai pengendalian diri, unsur hakikat manusia: fisik-moral-sosial-intelektual-volisional-estetik-spiritual-budaya tidak dikembangkan dan berkembang secara kokoh harmonis. Sesuatu disebut pembangunan intelektual tetapi ternyata manusia/anak didik dibuat menjadi bersikap intelektualistis, membuat rasio sebagai segalanya dan bukan didik agar anak didik meningkat disiplin akal-budinya senantiasa diterangi dan dibimbing oleh kebenaran dan oleh kebenaran yang lebih benar, serta berani dan mau tunduk pada yang lebih baik karena lebih kokoh evidensinya. Pembangunan moral keras-keras dicanangkan tetapi ternyata hal-hal yang memerosotkan kemoralan, menipiskan kemoralan orang perorang dan masyarakat didiadakan saja seperti misalnya iklan kondom dua lima yang terdapat di mana-mana, spanduk iklan pembalut wanita terpampang spektakuler di jalan-jalan penting dan di tempat-tempat strategis, seorang pemimpin masyarakat tanpa "saru-siku" dengan lantang menyatakan di depan umum bahwa ia memakai kondom tiga kali dalam seminggu, dan seterusnya.

Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan pembangunan adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan eksistensi manusia dalam proses kehidupannya memperjuangkan integritas kemanusiaannya dan integritas kemanusiawiaannya.

Batas-batas pembangunan adalah batas-batas manusia sebagai manusia. Puncak-puncak pembangunan adalah puncak-puncak yang dapat dan mungkin dicapai oleh manusia sebagai manusia. Dan suatu bangsa akan memperoleh kualitas pembangunan sebatas kualitas dari bangsa itu. Suatu bangsa memperoleh kualitas pembangunan seperti yang sepantasnya diperolehnya. Jangan harap lebih dari itu. Oleh karena itu pendidikan yang baik dan benar merupakan kunci pembangunan. Dan urgensi pendidikan yang semestinya menjadi sangat meningkat dalam tahap-tahap peningkatan kegiatan pembangunan.

Pendidikan Sebagai Kunci Pembangunan

Adalah mimpi kalau orang mengharapkan seseorang menginginkan sesuatu yang tidak diketahui. *Ignoti nulla cupido*, kata ucapan bahasa Latin. Adalah mimpi kalau kita mengharapkan bangsa kita akan mampu dan mau menginginkan nilai-nilai kemanusiaan yang agung dan lebih agung, yang kaya dan lebih kaya, yang dalam dan lebih dalam, yang terpuji dan lebih terpuji, yang tinggi dan lebih tinggi manakala pendidikan kita tidak dipersiapkan untuk membuat anak-anak didik kita mengetahui nilai-nilai kemanusiaan dengan seluruh kedalaman dan kekayaannya, tidak dipersiapkan untuk membuktikan bahwa budi pekerti (*zedeltijke zin*) lebih penting dari pada petualangan rasio manusia memperebutkan alam, bahwa "*what we are*" perlu lebih ditekankan dari pada "*what we have*", bahwa pembentukan lebih mendesak dari pada informasi, "menjejal" anak didik dengan informasi.

Kekacauan dalam diskusi tentang etika pembangunan bersumber juga pada kekacauan pengertian banyak orang tentang moralitas, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Moralitas bukan masalah preferensi, bukan semacam alat yang efisien. Moralitas adalah kewajiban manusia untuk berbuat sebagaimana seharusnya seorang manusia berbuat. Ukuran moralitas bukan sukses (berhasil) atau tidaknya.

Oleh karena itu terdapat dua hal yang tidak dapat ditawar dalam pendidikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas tinggi. Dua hal tersebut adalah: *sense of man* dan *sense of God*.

Sense of man. Diketahui bahwa manusia adalah dasar, titik berangkat, pusat, tujuan dari pembangunan. Pemahaman, pendalaman, tentang kenyataan manusia menjadi postulat,

premis dari segala bentuk pembangunan. Semua pembangunan tersebut adalah demi pembangunan manusia, demi perwujudan manusia sesuai rencana penciptaan Sang Pencipta. Maka hal yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah *sense of man* yakni kepekaan dan kesadaran yang tajam, mendalam, berkembang terhadap *human richness*, terhadap segala nilai-nilai insani, segala nilai-nilai kebajikan yang semakin dapat mengangkat manusia dari kemungkinan-kemungkinan keterjerumusnya. Hak asasi manusia yang paling diabaikan dan dilupakan adalah haknya untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh hakikatnya dalam proses pembangunan. Apabila manusia terlupakan dan dilupakan, maka pembangunan akan merupakan proses dehumanisasi maka juga proses demoralisasi. Ini bencana.

Pasangan yang mempunyai kaitan dialektis dengan *sense of man* dan keduanya *de jure* merupakan spiritualitas pembangunan adalah *sense of God*.

Sense of man tidak ter jelaskan tanpa *sense of God*, tetapi *sense of God* juga tidak ter jelaskan tanpa *sense of man*. Oleh karenanya teologi adalah antropologi dan antropologi adalah teologi.

Sense of God adalah kepekaan, kesadaran yang tajam, mendalam, berkembang terhadap kehadiran Tuhan, terhadap segalanya yang Ilahi, terhadap *milieu* Illahi di mana kita senantiasa berada, yang ada kaitannya dengan misteri kehidupan.

Berbagai kenyataan hidup mengajarkan bahwa manusia sendiri tidak mampu menyelamatkan manusia. Tanpa Tuhan percuma lah seluruh usaha pembangunan.

(DR. W. Poespoprodjo, B.Ph., L.Ph., S.S., S.H. adalah Dosen Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung).